

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Premi Kucurkan Bansos Rp 690 Miliar

Palmerah, Warta Kota

Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta telah membagikan kartu ATM Bank DKI bagi penerima baru bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD), Selasa (23/7/2024).

Penerima PKD yang menerima kartu ATM ini adalah pemilik Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), serta Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

"Jumlah penerima baru bansos PKD tahun 2024 sebanyak 78.097 orang terdiri dari, penerima KAJ 17.398 anak, penerima KLJ 54.165 lansia, dan penerima KPDJ 6.534 orang," ujar Kepala Dinsos Jakarta Premi Lasari dalam keterangannya, Rabu (24/7/2024).

Penerima bansos PKD ini akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 300.000 per bulannya, selama enam bulan terhitung dari Januari hingga Juni 2024.

Total bantuan yang didapat sebesar

Rp 1,8 juta. "Nantinya dana bansos tersebut akan di-top up pada awal bulan Agustus 2024, waktunya akan ditentukan kemudian," ucapnya.

Premi mengatakan, awalnya penerima bansos PKD tahun ini ditargetkan sebanyak 219.252 orang. Realisasi pencairan tahap 1 sebanyak 194.067 orang dan tahap 2 ada 188.746 orang.

"Berkurangnya jumlah penerima bansos PKD pada setiap tahapan karena adanya verifikasi dan validasi yang dilakukan dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran," ucapnya.

Dinsos selalu melakukan cleansing data pada setiap tahapan pencairan agar penyaluran bansos PKD tepat sasaran.

"Cleansing dilakukan untuk penetapan data sasaran. Cleansing bagi mereka yang tidak termasuk dalam kriteria pada Pergub Nomor 44 Tahun 2022," ujar Premi.

Adapun, alokasi anggaran tahun 2024 untuk bansos PKD sebelum terkena

cleansing data sebesar Rp 802.462.320.00.

"Karena adanya cleansing, sesuai dengan hasil verval Pusdatin Kesos berdasarkan pada kriteria penerima bansos, maka anggaran bansos PKD yang terserap pada tahun 2024 ini sebesar Rp 690.810.360.000," jelasnya.

Sesuai dengan pengelolaan keuangan negara, anggaran yang tidak diserap akan dikembalikan ke kas daerah melalui perubahan pergeseran pada APBD-P setiap tahun berjalan.

Pemadanan data

Sebelumnya Dinas Sosial melakukan sejumlah tahapan pembersihan dan pemadanan data calon penerima bansos PKD.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan ketepatan dan kelayakan sasaran penerima bansos PKD Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) 2024.

"Pada tahap pertama, kami memadankan data calon penerima bansos PKD dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berstatus layak pada sistem Kementerian Sosial RI," ujar Premi. Tahapan kedua, Dinsos memadankan data melalui web service Kependudukan Kemendagri untuk mendapatkan data status meninggal dunia dan pindah ke luar Provinsi DKI Jakarta.

"Lalu, kami melakukan pemadanan dengan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta untuk mengetahui kepemilikan aset, seperti kepemilikan kendaraan mobil dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas 1 miliar rupiah," ujar Premi.

Keempat, Dinsos melakukan pemadanan dengan data Warga Binaan Sosial (WBS) panti sosial untuk menentukan prioritas penerima bantuan sosial tersebut.

"Kami juga memadankan data calon penerima dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk mendapatkan

status peringkat kesejahteraan dalam bentuk desil," imbuhnya.

Penerima bantuan sosial eksisting (desil 1-4) yang dinyatakan masih layak berdasarkan hasil padanan tersebut, akan ditetapkan kembali sebagai penerima bantuan sosial dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Penerima Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahap 1 Tahun 2024.

Tercatat, ada sebanyak 63.698 penerima bantuan sosial eksisting, terdiri dari 53.709 penerima KLJ, 6.626 penerima KPDJ, dan 3.363 penerima KAJ. Namun, terdapat 972 calon penerima bansos tahap 1 yang belum dinyatakan layak menerima bantuan, terdiri dari KLJ sebanyak 696 orang,

KPDJ 93 orang, dan KAJ 183 orang. Hal tersebut lantaran mereka terindikasi tidak memenuhi kelayakan dalam padanan data Kemensos RI, WBS panti sosial, Bapenda, dan web service Kependudukan Kemendagri. (**Kompas.com**)